

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Kecamatan 2x11 Kayu Tanam

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)

TAHUN 2025

KECAMATAN 2x11 KAYUTANAM



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KECAMATAN 2 x 11 KAYUTANAM

Jalan Raya Padang Bukittinggi Km. 54 Kayutanam 25585
Telephone : (0751) 684211, e-mail ; kayu_tanam@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT 2x11 KAYUTANAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR : 072/KEP/C-KTM/2025

TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN PERUBAHAN KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
9. Keputusan Camat 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Nomor /KEP/C-KTM/2025 Tentang Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja-P)Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten

Padang Pariaman Tahun 2025

- KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode yang dimulai pada tanggal 23 Oktober 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Pedoman Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Padang Pariaman.
 - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini, Anggaran Penyusunan Renja-P Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dibebankan kepada APBD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Ditetapkan di : Kayutanam

Pada Tanggal : 23 Oktober 2025

CAMAT 2 x 11 KAYU TANAM



JUNAIDI SYAH, S.Sos

NIP. 19741113 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan-P) Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan-P) tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan 2x11 Kayutanam Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan-P) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

**CAMAT 2x11 KAYUTANAM**
JUNAIDI SYAH, S.Sos
NIP. 19741113 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	59
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	60
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	62
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	68
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	63
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	68
3.3. Program dan Kegiatan	72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	81
BAB V PENUTUP	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja Perubahan PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja Perubahan PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja Perubahan PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja Perubahan PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja Perubahan PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terKoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja Perubahan PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja Perubahan PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja Perubahan PD sebagai bagian penting dari

siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja Perubahan PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perubahan PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja Perubahan PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja Perubahan PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja Perubahan PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja Perubahan PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja Perubahan PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja Perubahan PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja Perubahan PD adalah

melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja Perubahan PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja Perubahan PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja Perubahan PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja Perubahan PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perubahan Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perubahan PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja Perubahan PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

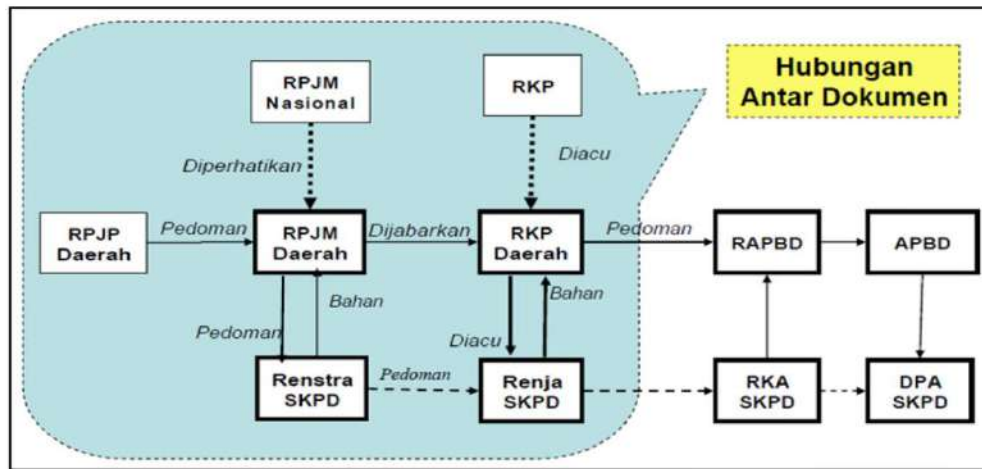
Selain itu, Renja Perubahan PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja Perubahan PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja Perubahan PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Perubahan Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja Perubahan PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja Perubahan PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya Koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja Perubahan PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perubahan Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja Perubahan menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja Perubahan menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja Perubahan juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja Perubahan dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja Perubahan dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Kecamatan berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Kecamatan 2x11 Kayutanam dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (Renja Perubahan) Kecamatan 2x11 Kayutanam disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam merupakan

salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Perubahan Kecamatan memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Kecamatan 2x11 Kayutanam dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Kecamatan 2x11 Kayutanam dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja Perubahan) Kecamatan 2x11 Kayutanam merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Perubahan Kecamatan ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik Kecamatan dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Kecamatan 2x11 Kayutanam untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja Perubahan. Dalam konteks ini, Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung

bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Perubahan Kecamatan Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Kecamatan dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja Perubahan, Kecamatan 2x11 Kayutanam juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja Perubahan dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Kecamatan 2x11 Kayutanam dengan Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja Perubahan adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja Perubahan merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja Perubahan harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja Perubahan tahun 2021-2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja Perubahan dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja Perubahan. Dengan demikian, Renja Perubahan juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja Kecamatan dalam jangka pendek, sehingga Kecamatan dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja Perubahan dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja Perubahan harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis Kecamatan dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perubahan Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja Perubahan PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja Perubahan PD.

1.3 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur

penilaian kinerja Kecamatan 2x11 Kayutanam untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 2x11 Kayutanam.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan 2x11 Kayutanam. Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan OPD, proses penyusunan Renja Perubahan OPD, keterkaitan antara Renja Perubahan OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja Perubahan K/L dan Renja Perubahan provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja Perubahan) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koor Kecamatan dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja Perubahan yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja Perubahan dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan tahun lalu (2025) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Targe t	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
			Realisasi	%	Satuan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	100	Dok	1.080.000,00	810.000,00	75,00

2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan	Targe t	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
			Realisasi	%	Satuan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Dok	9.600.000,00	6.120.590,00	63,75
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	Dok	40.800.000,00	30.000.000,00	73,52

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
			Realisasi	Satuan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	12	Laporan	240.000,00	0,0	0,0

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
		Target	Realisasi	Satuan			

1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	PKK	2.100.000,00	1.456.000,00	69,33
---	---	---	---	-----	--------------	--------------	-------

D. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
		Target	Realisasi	Satuan			
1.	Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1	0	Keg	240.000,00	0,0	0,0
2.	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	0	Keg	240.000,00	0,0	0,0

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
		Target	Realisasi	Satuan			
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	0	Laporan	120.000,00	0,00	0,0%

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
		Target	Realisasi	Satuan			

1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	Dok	680.000,00	600.000,00	88,23
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Dok	720.000,00	720.000,00	100

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
		Target	Realisasi	Satuan			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10	10	Orang/Bulan	419.984.462,00	377.541.576	89,89
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	5	Orang/Bulan	37.320.000,00	37.290.000,00	99,91

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
		Target	Realisasi	Satuan			
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6	6	Paket	953.000,00	890.000,00	93,38
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	Paket	1.210.150,00	1.100.000,00	90,89
1.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4	4	Paket	628.900,00	614.000,00	97,63
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Laporan	13.178.900,00	12.562.000,00	95,31
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan	92.620.000,00	86.291.300	93,16

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
		Target	Realisasi	Satuan			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan	6.789.000,00	6.698.000,00	98,65
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Laporan	9.600.000,00	6.120.590,00	63,75

3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Laporan	40.800.000,00	30.000.000,00	73,52
----	---------------------------------------	----	----	---------	---------------	---------------	-------

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
		Target	Realisasi	Satuan			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Kecamatan atau Kendaraan Kecamatan Jabatan	1	1	Unit	8.745.000,00	8.741.500,00	99,95
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	Gedung/Tahun	10.000.000,00	9.618.220,00	96,18
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	1	1	Unit	8.425.000,00	8.253.000,00	97,95

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
		Target	Realisasi	Satuan			
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2	Unit	25.530.000,00	24.411.801,00	95,62

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1) Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
		Target	Realisasi	Satuan			
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	4	4	Nagari	2.910.950,00	2.890.000,00	99,28

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
		Target	Realisasi	Satuan			
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1	1	Keg	16.720.250,00	16.264.770,00	97,27

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Adanya perencanaan strategis dan operasional yang jelas.
- Penyusunan Rencana Kerja (Renja Perubahan) yang sesuai dengan visi dan misi OPD.
- Penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan Renja Perubahan, diantaranya :

- Waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan
- Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai
- Manajemen Kas Pemerintah Daerah dalam rangka efisiensi anggaran.
- Adanya batasan GU sehingga tidak bisa melakukan pencairan

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja Perubahan) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Kecamatan 2x11 Kayutanam dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2025:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam. Tahun 2025 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Kecamatan dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Kecamatan 2x11 Kayutanam, tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2025 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Kecamatan 2x11 Kayutanam. mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan

program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2025 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.

- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam tahun 2025. Jika Kecamatan tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2025. Ini akan membantu Kecamatan dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

- b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Kecamatan bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2025.

- c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang

telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Kecamatan mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Kecamatan dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2025. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam dan Pencapaian Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam. s/d Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
										Target Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
								Nilai	B	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
							Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	%	85%	%	94%	94%	100%	100%	100%
							Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	%	85%	%	94%	94%	100%	100%	100%

7	0 1	0 1	2	0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	6 Dok	Dokumen	6 Dok	6 Dok	5 dokumen	5 dokumen	100%
7	0 1	0 1	2	0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4 Laporan	Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	0 1	0 1	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	14 orang/14 bulan	Orang / Bulan	14 orang/14 bulan	14 orang/14 bulan	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	100%
7	0 1	0 1	2	0 2	0 5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	11 Dokumen	Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	0 1	0 1	2	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	%	90%	%	90%	90%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Kecamatan beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Kecamatan		1 Unit	Paket	1 Unit	1 Unit		20 Paket	100%

							beserta Atribut Kelengkapan	Paket					20 Paket		
	0 1	0 1	2	0 5	0 3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	20 Paket	Unit	20 Paket	20 Paket	1 Unit	1 Unit	100%
	0 1	0 1	2	0 5	0 4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	0 1	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat Kecamatan yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20 Paket	Paket	20 Paket	20 Paket	4 Paket	4 Paket	100%
7	0 1	0 1	2	0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7 Laporan	Paket	7 Laporan	7 Laporan	4 Paket	4 Paket	100%
						Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50 Paket	Dokumen	50 Paket	50 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

7	0	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Dokumen	Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Paket	12 Paket	100%
7	0	0	2	0	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	6 Paket	Laporan	6 Paket	6 Paket	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20 Laporan	Laporan	20 Laporan	20 Laporan	450 Laporan	450 Laporan	100%
7	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	%	80%	%	80%	80%	86%	86%	86%
7	0	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Kecamatan atau Kendaraan Kecamatan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Kecamatan atau Kendaraan Kecamatan Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit R2	Unit	1 Unit R2	1 Unit R2	1 Unit R2	1 Unit R2	100%
7	0	0	3	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	4 Unit	4 Unit	100%
7	0	0	4	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3 unit	Unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%

7	0	0	5	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7	0	0	6	1	0	Pengadaan Kendaraan Kecamatan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Kecamatan Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	700 arsip	Laporan	700 arsip	700 arsip	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 tagihan/tahun	Laporan	12 tagihan/tahun	12 tagihan/tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	15 unit/tahun	Laporan	15 unit/tahun	15 unit/tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%

7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Orang/12 bulan	Laporan	4 Orang/12 bulan	4 Orang/12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	0	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kecamatan atau Kendaraan Kecamatan Jabatan	Jumlah total nilai aset	Unit	2 unit/tahun	Unit	2 unit/tahun	2 unit/tahun	2 unit/tahun	2 unit/tahun	100%
7	0	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1Gedung/Tahun	Unit	1Gedung/Tahun	1Gedung/Tahun	2 Unit	2 Unit	100%
7	0	0	2	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 buah/tahun	Unit	10 buah/tahun	10 buah/tahun	2 Unit	2 Unit	100%
7	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase UKM yang difasilitasi dalam	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%

							Pengembangan Usaha										
7	0 1	0 3	2	0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 3	2	0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasarakatan	100%	Lembaga Kemasarakatan	100%	100%	8 Lembaga Kemasayarakatan	8 Lembaga Kemasayarakatan	100%		
7	0 1	0 3	2	0 1	0 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%		

7	0 1	0 3	2	0 1	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	0 1	0 6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	90%	90%	90%
7	0 1	0 6	2	0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%
7	0 1	0 6	2	0 1	0 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
7	0 1	0 6	2	0 1	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%

7	0 1	0 6	2	0 1	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
7	0 1	0 6	2	0 1	0 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
7	0 1	0 2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan Persentase UKPP Kecamatan Bernilai Baik Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 2	2	0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible]

7	0 1	0 2	2	0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		%		%				83%	83%	83%
7	0 1	0 2	2	0 3	0 1	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
7	0 1	0 4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100%	%	100%	100%		90%	90%	90%
7	0 1	0 4	2	0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	%	100%	100%		92%	92%	92%
							Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100%	%	100%	100%		92%	92%	92%
							Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban		100%	%	100%	100%				

							Umum tugas Forum Pimpinan Kecamatan	%						92%	92%	92%
							Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	%	100%	%	100%	100%		92%	92%	92%
7	0 1	0 4	2	0 1	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Lapora n	
7	0 1	0 4	2	0 1	0 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Lapora n	
7	0 1	0 5				PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan Persentase Anggota Dewan dari Wilayah Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	90%	90%	90%	

7	0 1	0 5	2	0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%
7	0 1	0 5	2	0 1	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	3 Kali	Orang	3 Kali	3 Kali	60 orang	60 orang	60 orang
7	0 1	0 5	2	0 1	0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokum en

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 rincian Uraian Tugas Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman disebutkan bahwa :

Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan OPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, esselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat:

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah dan mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;

- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan

- kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
 - f. pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
 - 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
 - g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
 - 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.

- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
 - 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
 - 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan,saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana (Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman) dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

1. Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan

- perangkat nagari;
- 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
- 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
- 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
- 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi

- penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
 - n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan

- olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
 - f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
 - h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
 - i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi

kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan

penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Kecamatan 2x11 Kayutanam. Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a).	Tujuan	:	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
b).	Sasaran	:	1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
c).	Indikator Kinerja	:	1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat Kecamatan 2. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani 3. Persentase Pelayanan yang tepat waktu 4. Nilai SAKIP Kecamatan

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Tahun 2025	Indikator Kinerja Tahun 2026	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	97%	?	100	100	
2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	?	100	100	
3	Persentase Pelayanan Tepat Waktu	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	?	100	100	
4	Nilai SAKIP Kecamatan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	BB	BB	B	BB	BB	BB	

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 2x11 Kayutanam. Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Kecamatan telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	%	100	98	98	Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	100	100	Berhasil
		3. Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	95	95	Berhasil
3.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	4. Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	B	B	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan
 - 2) Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
 - 3) Nilai AKIP Perangkat Daerah.

I. Sasaran Strategis Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Kategori / Interpretasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	97	97%	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus utama. Pada tahun ini, capaian persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 97%.

Dari data yang terkumpul, terdapat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan umum di kecamatan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara mencapai 98% yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan transparansi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan di tingkat kecamatan juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif, tantangan tetap ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna

memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Harapannya, hasil yang dicapai ini tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

II. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	97	97	Berhasil
		2.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	97	97	Berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kecamatan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, tepat, dan transparan. Capaian tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam dua aspek penting: persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayaniserta persentase pelayanan yang tepat waktu.

Capaian persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani di tingkat kecamatan mencapai 97% Angka ini mencerminkan upaya maksimal pemerintah kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti usaha, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dengan peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan terbantu dalam mengurus izin yang diperlukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal

Dalam aspek ketepatan waktu, capaian pelayanan yang tepat waktu juga menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase mencapai 97%. Pelayanan yang tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Peningkatan ketepatan waktu dalam pengolahan permohonan perizinan dan non-perizinan ini menunjukkan efisiensi proses administrasi yang telah diterapkan oleh aparatur

kecamatan. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih baik, pelatihan bagi petugas pelayanan, serta penyederhanaan prosedur yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah kecamatan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan feedback akan terus didorong untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan. Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

III. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan		Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	B	BB	70.55	Realisasi melebihi target

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil. Capaian Nilai SAKIP tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator nyata dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan mencapai BB yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat B. Nilai ini diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berhasil dalam menyusun rencana kerja yang lebih baik, melaksanakan program-program secara efektif, serta melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kecamatan. Melalui pelatihan dan

pengembangan kompetensi, aparaturnya menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan kinerja juga turut mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kinerja pemerintahan.

Meskipun capaian Nilai SAKIP ini menunjukkan hasil yang positif, pemerintah kecamatan tetap menyadari pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja akan menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berikut capaian IKD dan SPM Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026 :

Tabel 2.8
Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	

4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan 2x11 Kayutanam sebagai berikut :

- Tingkat Kinerja Kecamatan 2x11 Kayutanam dari 5 indikator terdapat 5 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
 - a) Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan
 - b) Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah
 - c) Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan
 - d) Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan
 - e) Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan 2x11 Kayutanam antara lain :
 - a) Belum adanya SPM Kecamatan 2x11 Kayutanam
 - b) Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
 - c) Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi, hal ini berkaitan dengan belum terpenuhinya pembinaan administrasi seiring dengan peraturan baru
 - d) Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan, hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya pelaksanaan pengawsan dan evaluasi serta penyelenggaraan kegiatan yang sinkron atau satu kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja Perubahan) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja Perubahan dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat

komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja Perubahan yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja Perubahan yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan 2x11 Kayutanam	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	652.734.412	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan 2x11 Kayutanam	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	652.734.412	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB		
			Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%				Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan 2x11 Kayutanam	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	240.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan 2x11 Kayutanam	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	240.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan 2x11 Kayutanam	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	5.010.950	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan 2x11 Kayutanam	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	5.010.950	
4	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan 2x11 Kayutanam	Persentase Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	120.000	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan 2x11 Kayutanam	Persentase Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	120.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan 2x11 Kayutanam	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100%	16.720.250	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan 2x11 Kayutanam	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100%	16.720.250	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan 2x11 Kayutanam	Persentase terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	100%	480.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan 2x11 Kayutanam	Persentase terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	100%	480.000	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam. Namun dalam proses ini Kecamatan 2x11 Kayutanam. mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana	Nagari Anduriang	Putusnya mbatan penghubung unt	1 Paket	
2.	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana	Nagari Anduriang	Perbaikan jalan di beberapa titik penghubung di Korong Balah Aie, Nagari Anduriang	1 Paket	

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Lkota	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84.00
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	2.95
		Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Partai Politik yang Aktif	70
		Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	25
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100
		Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	30

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja Perubahan) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja Perubahan perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan 2x11 Kayutanam. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Kecamatan, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Kecamatan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja Perubahan perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja Perubahan perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang

positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Tabel 3.1.1

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
	pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja Perubahan) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja Perubahan ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja Perubahan yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja Perubahan, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera

diambil. Dengan demikian, Renja Perubahan tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Kecamatan 2x11 Kayutanam. Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan** dengan Indikator Tujuan: **Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat'**
- 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas** dengan Indikator: **Nilai SAKIP Pemerintahan Daerah'**

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2025	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2025
Padang Pariaman Maju dan Sejahter	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71.4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,00
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100
					Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	75

Tabel 3.2.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	35	40	45	50	60

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk Kecamatan, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program Kecamatan harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh Kecamatan dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, Kecamatan perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan 2x11 Kayutanam mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Kecamatan tahun 2025 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4),

memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan Kecamatan harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Kecamatan harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program Kecamatan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menysasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti

pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Kecamatan harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2025 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Kecamatan harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Kecamatan 2x11 Kayutanam..... Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 dapat disusun secara strategis, efektif, dan

berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan 2x11 Kayutanam..... Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM								
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. 2x11 KAYUTANAM	6 Dokumen	2.480.000	DAU		5 Dokumen	3.600.000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. 2x11 KAYUTANAM	6 Dokumen	680.000	DAU		5 Dokumen	1.200.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. 2x11 KAYUTANAM	2 Laporan	680.000	DAU		2 Laporan	1.200.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. 2x11 KAYUTANAM	1 Dokumen	720.000	DAU		1 Dokumen	1.200.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan	Kec. 2x11 KAYUTANAM		1.080.000	DAU			436.960.000

7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. 2x11 KAYUTANAM	14 Orang/bulan	457.304.462	DAU		14 Orang/bulan	400.000.000
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. 2x11 KAYUTANAM	12 Dokumen	419.984.462	DAU		12 Dokumen	36.240.000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. 2x11 KAYUTANAM	1 Laporan	37.320.000	DAU		1 Laporan	720.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. 2x11 KAYUTANAM		0	DAU			104.500.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. 2x11 KAYUTANAM	4 Paket	108.590.950	DAU		4 Paket	1.820.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. 2x11 KAYUTANAM	4 Paket		DAU		4 Paket	1.820.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. 2x11 KAYUTANAM	4 Paket	953.000	DAU		4 Paket	2.195.500
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. 2x11 KAYUTANAM	12 Laporan	628.900	DAU		12 Laporan	1.578.500
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. 2x11 KAYUTANAM	450 Laporan	1.210.150	DAU		450 Laporan	88.250.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. 2x11 KAYUTANAM		92.620.000.00	DAU			40.500.000
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. 2x11 KAYUTANAM	12 Laporan	13.178.900	DAU		12 Laporan	9.500.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	Kec. 2x11 KAYUTANAM	12 Laporan	57.189.000	DAU		12 Laporan	9.500.000

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. 2x11 KAYUTANAM	12 Laporan		DAU		12 Laporan	21.600.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.789.000	DAU			20.900.000
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. 2x11 KAYUTANAM	2 Unit	9.600.000	DAU		2 Unit	15.000.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. 2x11 KAYUTANAM	1 Unit	40.800.000	DAU		1 Unit	15.000.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. 2x11 KAYUTANAM	5 Unit	27.170.000	DAU		5 Unit	4.500.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kec. 2x11 KAYUTANAM			DAU			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kec. 2x11 KAYUTANAM		8.745.000	DAU			12.480.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	Kec. 2x11 KAYUTANAM	1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	12.000.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. 2x11 KAYUTANAM	1 Dokumen	8.425.000	DAU		1 Dokumen	480.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec. 2x11 KAYUTANAM			DAU			960.000

7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. 2x11 KAYUTANAM	1 Laporan		DAU		1 Laporan	960.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. 2x11 KAYUTANAM		5.010.950	DAU			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			2 Dokumen	2.910.950	DAU		2 Dokumen	9.000.000
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. 2x11 KAYUTANAM	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.100.000	DAU		8 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. 2x11 KAYUTANAM	4 Laporan		DAU		4 Laporan	5.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec. 2x11 KAYUTANAM		480.000	DAU			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. 2x11 KAYUTANAM		240.000	DAU			1.440.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. 2x11 KAYUTANAM	4 Laporan	240.000	DAU		4 Laporan	720.000
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. 2x11 KAYUTANAM	4 Laporan		DAU		4 Laporan	720.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. 2x11 KAYUTANAM		120.000	DAU			

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. 2x11 KAYUTANAM	1 Laporan	120.000	DAU		1 Laporan	20.900.000
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. 2x11 KAYUTANAM	60 Orang	0,00	DAU		60 Orang	20.900.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. 2x11 KAYUTANAM	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec. 2x11 KAYUTANAM			DAU			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. 2x11 KAYUTANAM	1 Laporan	240.000	DAU		1 Laporan	1.440.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. 2x11 KAYUTANAM	4 Dokumen	240.000	DAU		4 Dokumen	720.000
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. 2x11 KAYUTANAM	4 Dokumen	0.00	DAU		4 Dokumen	720.000

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
KAB. PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B erkurang (10- 12)	LO KASI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							2025	SEBE LUM	SESU DAH	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025	NAS IONAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM								941.577. 598,00	888.013. 552,00	722.488. 402,00	- 219.089.196,00						1.082.746.096,00		
	7	UNSUR KEWILAYAH AN							941.577. 598,00	888.013. 552,00	722.488. 402,00	- 219.089.196,00							1.082.746.096,00		
	7.01	KECAMATAN							941.577. 598,00	888.013. 552,00	722.488. 402,00	- 219.089.196,00							1.082.746.096,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintaha n Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti	100, BB, 100	100, BB, 100	100, BB, 100	100, BB, 100	100, BB, 100	870.295. 098,00	844.991. 052,00	700.757. 202,00	-35.549.002,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		100, BB, 100	834.746.096,00		

	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah</i>	100	100	100	100	100	11.524.0 00,00	41.620.0 00,00	12.816.0 00,00	1.292.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel	Kecamata n 2x11 Kayutana m	100	42.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Doku men	6 Doku men	6 Dokum en	6 Doku men	6 Doku men	5.524.00 0,00	5.524.00 0,00	0,00	-5.524.000,00	Kab. Padang Pariam an, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Des a	DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		6 Doku men	18.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		6 Laporan	9.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	2.400.000,00	32.496.000,00	12.816.000,00	10.416.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		6 Laporan	15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	492.098.298,00	475.117.252,00	475.117.252,00	-16.981.046,00	2x11 Kayu Tanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	1 tahun	474.746.096,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

																Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel				
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ b ulan	12 Orang/ b ulan	12 Orang/b ulan	12 Orang/ b ulan	12 Orang/ b ulan	0,00	441.637. 252,00	441.637. 252,00	441.637.252,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		12 Orang/ b ulan	432.186.096,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7	NON URUSAN							941.577. 598,00	888.013. 552,00	722.488. 402,00	219.089.196,00							1.082.746.096,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG XX							941.577. 598,00	888.013. 552,00	722.488. 402,00	219.089.196,00							1.082.746.096,00	
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	UNSUR KEWILAYAH AN							941.577. 598,00	888.013. 552,00	722.488. 402,00	219.089.196,00							1.082.746.096,00	
	7.01	KECAMATAN							941.577. 598,00	888.013. 552,00	722.488. 402,00	219.089.196,00							1.082.746.096,00	
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	37.320.000,00	33.480.000,00	33.480.000,00	-3.840.000,00	2x11 Kayu tanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		12 Dokumen	42.560.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	15.316.000,00	24.808.000,00	22.126.000,00	6.810.000,00	2x11 Kayu tanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	100%	18.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	7.992.000,00	0,00	0,00	-7.992.000,00	2x11 Kayu tanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		12 Unit	8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM

																Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel				
	7.01.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	7.324.00 0,00	24.808.0 00,00	22.126.0 00,00	14.802.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		4 Orang	10.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>persentase keselarasan dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	135.170. 300,00	134.595. 300,00	98.673.9 80,00	-36.496.320,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel	-	100%	120.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM

	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	1.756.00 0,00	1.756.00 0,00	953.000, 00	-803.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		6 Paket	4.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		12 Paket	4.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.163.800,00	2.163.800,00	1.210.150,00	-953.650,00	2x11 Kayutanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		12 Paket	5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.312.500,00	7.607.500,00	4.775.050,00	-3.537.450,00	2x11 Kayutanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		4 Paket	14.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.996.00 0,00	9.996.00 0,00	5.014.80 0,00	-4.981.200,00	2x11 Kayutanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		12 Laporan	13.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	112.942.000,00	113.072.000,00	86.720.980,00	-26.221.020,00	2x11 Kayutanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		12 Laporan	80.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	45.510.000,00	45.510.000,00	5.550.000,00	-39.960.000,00	2x11 Kayutanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	1 Unit	30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM

																Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel				
	7.01.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1 Unit	45.510.0 00,00	45.510.0 00,00	5.550.00 0,00	-39.960.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		6 Unit	30.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	112.079. 000,00	64.743.0 00,00	57.161.5 00,00	-54.917.500,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel	-	100 %	94.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM

	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Laporan	12 Lapora n	12 Lapora n	0,00	14.343.0 00,00	6.761.50 0,00	6.761.500,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		12 Lapora n	16.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7	NON URUSAN							941.577. 598,00	888.013. 552,00	722.488. 402,00	- 219.089.196,00							1.082.746.096,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG XX							941.577. 598,00	888.013. 552,00	722.488. 402,00	- 219.089.196,00							1.082.746.096,00	
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	UNSUR KEWILAYAH AN							941.577. 598,00	888.013. 552,00	722.488. 402,00	- 219.089.196,00							1.082.746.096,00	
	7.01	KECAMATAN							941.577. 598,00	888.013. 552,00	722.488. 402,00	- 219.089.196,00							1.082.746.096,00	
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Laporan	12 Lapora n	12 Lapora n	13.800.0 00,00	9.600.00 0,00	9.600.00 0,00	-4.200.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa		12 Lapora n	18.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM

																ran dan akunta bel				
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Laporan	12 Lapora n	12 Lapora n	84.000.0 00,00	40.800.0 00,00	40.800.0 00,00	-43.200.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		12 Lapora n	60.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	58.597.5 00,00	58.597.5 00,00	29.312.4 70,00	-29.285.030,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel	-	100 %	56.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM

	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	37.950.0 00,00	37.950.0 00,00	18.975.0 00,00	-18.975.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		2 Unit	50.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	10.647.5 00,00	10.647.5 00,00	3.680.00 0,00	-6.967.500,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		4 Unit	3.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi</i>	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	6.657.470,00	-3.342.530,00	2x11 Kayutanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		2 Unit	3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	14.820.000,00	7.020.000,00	0,00	95.180.000,00						100 %	110.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				1 tahun	1 tahun	11.220.000,00	5.220.000,00	0,00	-11.220.000,00	2x11 Kayutanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan 2x11 Kayutanam		104.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.820.000,00	3.420.000,00	0,00	-5.820.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		12 Laporan	90.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	1.800.000,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		12 Dokumen	14.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.600.000,00	1.800.000,00	0,00	-3.600.000,00	2x11 Kayu Tanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	100 %	00.000,00 6.0	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

																Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel					
	7.01.02.2.0 4.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Laporan	12 Lapora n	10 Lapora n	3.600.00 0,00	1.800.00 0,00	0,00	-3.600.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		12 Lapora n	00.000,00	6.0	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembanguna n Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	16.832.5 00,00	10.872.5 00,00	5.010.95 0,00	43.167.500,00						100 %	000.000,00	60.	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	10.340.0 00,00	5.280.00 0,00	2.100.00 0,00	-8.240.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan	-	1 tahun	000.000,00	50.	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM

																Publik yang bersih, transparan dan akuntabel					
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	10.340.000,00	5.280.000,00	2.100.000,00	-8.240.000,00	2x11 Kayutanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	12 Laporan	000.000,00	50.	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan	Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	6.492.500,00	5.592.500,00	2.910.950,00	-3.581.550,00	2x11 Kayutanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	12 Laporan	000.000,00	10.	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM

	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lemba ga Kemas yara katan	4 Lemba ga Kemas yara katan	4 Lembag a Kemas yara katan	4 Lemba ga Kemas yara katan	4 Lemba ga Kemas yara katan	6.492.50 0,00	5.592.50 0,00	2.910.95 0,00	-3.581.550,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		4 Lemba ga Kemas yara katan	10. 000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
3,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal terkait	1 Lapor an	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapor an	1 Lapor an	10.800.0 00,00	1.500.00 0,00	0,00	8.200.000,00						1 Lapor an	19. 000.000,00	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	5.400.00 0,00	900.000, 00	0,00	-5.400.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel	-	100%	10. 000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Lapora n	Lapora n	1 Laporan	1 Lapora n	1 Lapora n	5.400.00 0,00	900.000, 00	0,00	-5.400.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel		1 Lapora n	000.000,00	10.	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.04.2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.400.00 0,00	600.000, 00	0,00	-5.400.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel	-	100 %	00.000,00	9.0	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.04.2.0 2.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Lapora n 0	12 Lapora n 0	12 Laporan 0	12 Lapora n 0	1 Lapora n 0	5.400.00 0,00	600.000, 00	0,00	-5.400.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s.		12 Lapora n 0	00.000,00	9.0	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM

																Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel				
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase terselenggara nya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	23.190.0 00,00	19.190.0 00,00	16.720.2 50,00	16.810.000,00						100 %	40. 000.000,00	
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>persentase terselenggara nya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	23.190.0 00,00	19.190.0 00,00	16.720.2 50,00	-6.469.750,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel	-	100%	40.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.05.2.0 1.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	23.190.000,00	19.190.000,00	16.720.250,00	-6.469.750,00	2x11 Kayu tanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		100 Orang	40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
5,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.640.000,00	4.440.000,00	0,00	13.360.000,00						100 %	19.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.640.000,00	4.440.000,00	0,00	-5.640.000,00	2x11 Kayu tanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	4 Laporan	19.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4.200.000,00	3.000.000,00	0,00	-4.200.000,00	2x11 Kayu tanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	4 Dokumen	8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	780.000,00	780.000,00	0,00	-780.000,00	2x11 Kayu tanam	DAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	4 Dokumen	7.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																	

			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan</i>	4 Dokum en	4 Dokum en	4 Dokume n	4 Dokum en	4 Dokum en	660.000, 00	660.000, 00	0,00	-660.000,00	2x11 Kayuta nam	DAU	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel 5. Pening katan Kualita s Pelaya nan Publik yang bersih, transpa ran dan akunta bel	4 Dokum en	4.000.000,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN 2 X 11 KAYU TANAM
			J U M L A H						941.577. 598,00	888.013. 552,00	722.488. 402,00	- 219.089.196,00						1.082.746.096,00	

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, Koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Kecamatan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Kecamatan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Kecamatan dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Kecamatan ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kecamatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Kecamatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kayutanam, 19 September 2025

CAMAT 2X11 KAYU TANAM

JUNAIDI SYAH, S.Sos
NIP. 19741113 199503 1 001

HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH KEC.2X11 KAYU TANAM

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	✓
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (NANDA FAULANA PUTRA, SE, C.FrA, CTT)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	